



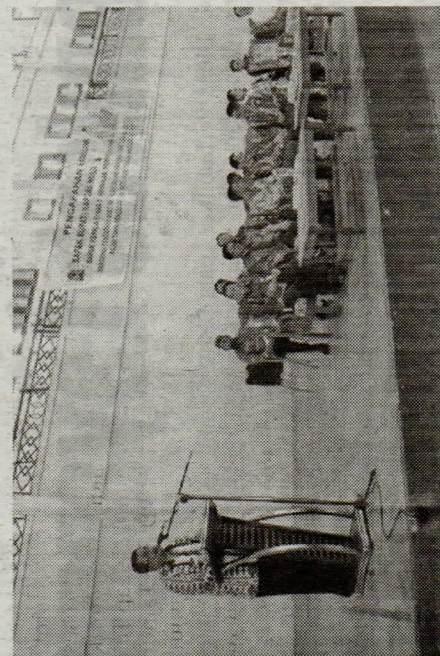
Banyak Aset Disdikpora Belum Tercatat

Di antaranya Gedung dan 133 Persil Tanah

PUTUSSIBAU-RK. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kapuas Hulu mengumpulkan seluruh kepala sekolah (TK, SD, SMP, SMA/SMK), pengawas sekolah, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) se-Kapuas Hulu, di Gedung Voli Indoor, Putussibau, Kamis (20/11). Langkah itu dilakukan pemerintah daerah untuk mewujudkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Kalbar.

Sebab, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kapuas Hulu mencatat, Disdikpora memiliki aset sekitar 133 persil tanah yang belum dicatat sesuai ketentuan tentang pengelolaan barang milik daerah.

Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir dalam arahnya di hadapan 600 orang yang hadir mengatakan, saat ini pemerintah daerah men-



Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir saat memberikan pengarahan aset pendidikan di Gedung Voli Indoor, Putussibau, Kamis (20/11). *Antara/Huayh*

ara, termasuk sekolah yang berdiri di atas tanah hibah dituntut untuk dirobohkan. Karena tanah tersebut akan digunakan oleh anak cucu dari sang pemberi hibah.

Menurut Bupati, kasus ini muncul akibat dari tidak dilakukannya proses administrasi hibah secara benar. Baik pada masa penghibahan hingga saat ini dan setelah ada tuntutan baru tersentak, seperti kebakaran jenggot.

Oleh karena itu, Nasir meminta kepada semua pihak agar dapat bekerjasama dengan Disdikpora untuk melakukan pendataan dan penataan aset kekayaan daerah di sektor pendidikan ini, yang dibantu bidang aset DP-PKAD. Sehingga pada tahun 2015, Pemkab Kapuas Hulu bisa meraih predikat WTP dalam mengelola manajemen keuangan daerah.

Di tempat yang sama, Kepala Disdikpora Kapuas Hulu, Drs Petrus Kusnadi MSI, mengatakan, opini WTP bukanlah hal yang mustahil diraih. Asalkan seluruh komponen yang ada terutama jajaran Disdikpora yang memiliki

aset cukup besar, dapat dilakukan pencatatan serta pengamanan aset sesuai ketentuan peraturan pengelolaan barang milik daerah.

"Bertitik tolak dari pikiran tersebut, maka kami memandang perlu untuk segera melakukan pembenahan pengelolaan barang milik daerah, sehingga aset-aset baik aset gedung maupun tanah dapat dicatat dan diamankan seluruh komponen Disdikpora Kapuas Hulu," ujar Kepala Disdikpora yang baru dilantik ini.

Mantan Kabid Perencanaan Pembangunan (P2) Setda Kapuas Hulu ini juga mengajak seluruh Kepala UPT dan kepala sekolah untuk membantu membenahi aset-aset mereka dengan melakukan pendekatan kepada pemangku kepentingan. Baik tokoh masyarakat maupun para ahli waris. "Akhirnya aset-aset bisa dicatat, diamankan demi kepentingan perencanaan pembangunan secara umum," demikian Kusnadi.

**LAPORAN: ARMAN HAIRIADI
EDITOR: JULIANUS RATNO**